

Pengaruh Ketergantungan Fiskal dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Keberlanjutan Keuangan Pemerintah Daerah

Muhammad Arifai¹, Mariana², Nurul Kamaliah³, Rahmati⁴, Miftahul Jannah⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301, Indonesia

¹ arifai_m@pnl.ac.id

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketergantungan fiskal dan kualitas pengungkapan laporan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2018–2022. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Artinya, semakin tinggi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat, semakin besar kapasitas fiskal daerah dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan layanan publik jangka panjang. Selain itu, kualitas pengungkapan laporan keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Semakin baik kualitas pengungkapan, semakin besar kontribusinya terhadap transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi transfer fiskal dan peningkatan kualitas pengungkapan laporan keuangan sebagai strategi kunci untuk memperkuat keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam konteks tata kelola sektor publik yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: ketergantungan fiskal, kualitas pengungkapan, keberlanjutan keuangan

Abstract— This study aims to analyze the effect of fiscal dependence and financial reporting disclosure quality on financial sustainability of local governments in Indonesia. The research employs a quantitative explanatory approach using secondary data obtained from Local Government Financial Reports (LKPD) for the 2018–2022 period. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS version 25. The results indicate that fiscal dependence has a positive and significant effect on financial sustainability. This finding implies that the higher the fiscal dependence of local governments on central transfers, the greater their fiscal capacity to maintain long-term stability and continuity of public services. Furthermore, the quality of financial disclosure also has a positive and significant effect on financial sustainability. Higher disclosure quality contributes to greater transparency, accountability, and sustainable financial management. Overall, this study highlights the importance of optimizing fiscal transfers and enhancing the quality of financial disclosure as key strategies to strengthen the financial sustainability of local governments within the framework of transparent and accountable public sector governance.

Keywords: fiscal dependence, disclosure quality, financial sustainability

I. PENDAHULUAN

Keberlanjutan keuangan pemerintah daerah merupakan isu strategis dalam tata kelola keuangan publik, khususnya pada era desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel guna menjamin kesinambungan pelayanan publik serta stabilitas fiskal jangka panjang. Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kendala berupa tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut menunjukkan rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan publik secara mandiri, sehingga berpotensi melemahkan stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah [1], [2]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, kualitas pengungkapan laporan keuangan berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang disajikan secara lengkap, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi instrumen utama dalam menciptakan kepercayaan publik dan memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara bertanggung jawab [3], [4]. Pengungkapan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang berkelanjutan melalui mekanisme transparansi dan pengawasan publik [5], [6]. Oleh karena itu, kualitas pengungkapan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

Kajian empiris sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada hubungan antara ketergantungan fiskal dan kemandirian daerah, sedangkan peran kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam memperkuat keberlanjutan keuangan masih terbatas [7], [8]. Penelitian ini memberikan kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan dua faktor utama, yaitu ketergantungan fiskal dan kualitas pengungkapan laporan keuangan, dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan keberlanjutan keuangan daerah. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan keberlanjutan fiskal serta mendukung upaya penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang bertujuan menguji hubungan kausalitas antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik [9]. Fokus penelitian adalah menganalisis pengaruh ketergantungan fiskal dan kualitas pengungkapan laporan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia, terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan unit analisis berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2018–2022. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki LKPD lengkap selama periode penelitian; (2) menyajikan data ketergantungan fiskal, kualitas pengungkapan, dan keberlanjutan keuangan; serta (3)

memiliki data pendapatan, belanja, dan transfer fiskal yang konsisten. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 540 pemerintah daerah dengan total 2.700 observasi panel.

Tabel 1. Operasional Variabel

| Nama Variabel | Definisi Konseptual | Indikator/Pengukuran |
|--|---|---|
| Ketergantungan Fiskal | Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pusat untuk membiayai pengeluaran (Marks et al., 2013). | Rasio dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH) terhadap total pendapatan daerah. |
| Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan | Tingkat kelengkapan, transparansi, dan keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah (Bisogno et al., 2017). | Indeks keterbukaan informasi keuangan online (pengungkapan wajib dan sukarela). |
| Keberlanjutan Keuangan Daerah | Kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang (Greiling et al., 2015). | Rasio solvabilitas, efisiensi belanja, dan pertumbuhan PAD. |

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 25 dengan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh ketergantungan fiskal dan kualitas pengungkapan laporan keuangan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Model analisis yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Keberlanjutan keuangan daerah
- X_1 = Ketergantungan fiskal
- X_2 = Kualitas pengungkapan laporan keuangan
- β_0 = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- e = Error term

Nilai signifikansi (p-value) < 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen pada tingkat kepercayaan 95%.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Variabel Independen | Koefisien (β) | t hitung | Sig. |
|-------------------------|---------------|----------|-------|
| Ketergantungan Fiskal | 0.185 | 7.686 | 0.000 |
| Kualitas Pengungkapan | 0.217 | 8.990 | 0.000 |
| Uji Kelayakan Model | | Nilai | |
| R | | 0.304 | |
| R ² | | 0.092 | |
| Adjusted R ² | | 0.091 | |
| F hitung | | 81.245 | |
| Sig. F | | 0.000 | |

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada Tabel IV.3 dan Tabel IV.4, diperoleh nilai R = 0,304 dan R² = 0,092, yang berarti sekitar 9,2% variasi keberlanjutan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel ketergantungan fiskal dan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Nilai F = 81,245 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel.

Secara parsial, hasil uji koefisien menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan dengan nilai β = 0,185 dan p < 0,001, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Demikian pula, kualitas pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan dengan nilai β = 0,217 dan p < 0,001, sehingga hipotesis kedua (H2) juga diterima.

Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal serta transparansi dalam pelaporan keuangan berkontribusi nyata terhadap peningkatan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, daerah yang mampu mengelola ketergantungan fiskalnya secara efisien dan memiliki praktik pengungkapan laporan keuangan yang baik cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih berkelanjutan.

Ketergantungan Fiskal berpengaruh terhadap Keberlanjutan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan (β = 0,185; p < 0,001). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat, semakin besar pula kapasitas untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Transfer fiskal dari pemerintah pusat berfungsi sebagai *resources* yang memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan pelayanan publik secara konsisten, sehingga menciptakan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya aliran dana yang stabil, pemerintah daerah mampu menutup keterbatasan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menjaga solvabilitas fiskal. Hasil ini mendukung temuan penelitian Masnawaty et al. [10] dan Hanipah et al. [11] yang menegaskan bahwa belanja

daerah berbasis transfer pusat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional sekaligus menopang keberlanjutan fiskal. Demikian pula, Woldesemayat [12] menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi makro.

Namun demikian, temuan ini juga dapat dipandang berbeda dengan literatur internasional seperti Barbier-Gauchard et al. [13] dan Buti et al. [14] yang menyoroiti sisi risiko dari ketergantungan fiskal yang terlalu tinggi. Transfer fiskal yang berlebihan justru dapat melemahkan disiplin anggaran, menurunkan insentif bagi daerah untuk meningkatkan PAD, dan pada akhirnya menimbulkan risiko fiskal jangka Panjang [13], [14]. Dalam hal ini, pengaruh positif yang ditemukan dalam penelitian ini perlu dipahami dengan syarat: ketergantungan fiskal akan berkontribusi positif terhadap keberlanjutan hanya apabila dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, hasil ini mempertegas bahwa transfer fiskal bukan sekadar instrumen pembiayaan teknis, tetapi juga bagian dari strategi penciptaan nilai publik melalui keberlanjutan fiskal. Stabilitas keuangan yang tercipta dari ketergantungan fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan layanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Keberlanjutan Keuangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan ($\beta = 0,217$; $p < 0,001$). Artinya, semakin baik kualitas pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, semakin tinggi pula tingkat keberlanjutan keuangan yang dapat dicapai.

Hasil ini mendukung temuan penelitian Aswar et al. [15] dan Li et al. [16] yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar internasional (IPSAS) dapat meningkatkan transparansi fiskal dan berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang lebih sehat. Penelitian Kanapickiene & Keliuotyte-Staniuleniene [17] dan Pivac et al. [18] juga menegaskan bahwa indeks kualitas pengungkapan dapat digunakan untuk mengukur keterbukaan yang berhubungan langsung dengan kinerja fiskal pemerintah daerah.

Namun, terdapat pula studi yang tidak sepenuhnya sejalan. Misalnya, Yamen & Can [8] menemukan bahwa persepsi tata kelola (governance perception) tidak selalu linier dengan kualitas pelaporan dan keberlanjutan fiskal, terutama ketika transparansi hanya dilakukan secara formal tanpa disertai perbaikan nyata dalam praktik pengelolaan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pengungkapan terbukti meningkatkan keberlanjutan fiskal, pengaruhnya tetap bergantung pada implementasi di masing-masing daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kualitas pengungkapan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam menciptakan nilai publik. Melalui transparansi yang tinggi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik, dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Semua ini berkontribusi langsung pada keberlanjutan keuangan daerah dalam jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

1. Ketergantungan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Semakin tinggi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat, semakin besar pula kapasitas daerah untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Hal ini selaras dengan kerangka Public Value Theory (PVT) yang menempatkan transfer fiskal sebagai sumber daya penting dalam menopang keberlanjutan layanan publik.
2. Kualitas pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Semakin baik kualitas pengungkapan, semakin besar pula kontribusinya terhadap pencapaian keberlanjutan fiskal. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terbukti memperkuat legitimasi fiskal, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan.

REFERENCE

- [1] A. Mol, V. van Schie, and T. Budding, "Drivers of sustainability reporting by local governments over time: A structured literature review," *Financ. Account. Manag.*, no. October 2023, pp. 1–30, 2024, doi: 10.1111/faam.12407.
- [2] I. Sulemana, L. Cheng, A. O. Agyemang, A. Osei, and T. M. Nagriwum, "Stakeholders and sustainability disclosure: Evidence from an emerging market," *Sustain. Futur.*, vol. 9, no. November 2024, p. 100445, 2025, doi: 10.1016/j.sftr.2025.100445.
- [3] J. Bryson, A. Sancino, J. Benington, and E. Sørensen, "Towards A Multi-Actor Theory of Public Value Co-Creation John Bryson, Alessandro Sancino, John Benington and Eva Sørensen April 2016 Draft submission to," *Public Adm. Rev.*, no. April, pp. 1–20, 2016.
- [4] R. Yaya, S. S. Irfana, H. A. Riyadh, and H. Sofyani, "The Influence of Public Welfare and Audit Findings on Audit Opinion: Empirical

- Evidence from Provincial Data in Indonesia,” *J. Asian Financ. Econ. Bus.*, vol. 8, no. 4, pp. 0181–0191, 2021, doi: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0181.
- [5] Z. Chen, J. Pan, L. Wang, and X. Shen, “Disclosure of government financial information and the cost of local government ’ s debt financing — Empirical evidence from provincial investment bonds for urban construction q,” *China J. Account. Res.*, vol. 9, no. 3, pp. 191–206, 2016, doi: 10.1016/j.cjar.2016.02.001.
- [6] G. Valenza and R. Damiano, “Sustainability reporting and public value: Evidence from port authorities,” *Util. Policy*, vol. 81, no. February, p. 101508, 2023, doi: 10.1016/j.jup.2023.101508.
- [7] W. Nor, M. Hudaya, and R. Novriyandana, “Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s),” *Asian J. Account. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 112–128, 2019, doi: 10.1108/AJAR-06-2019-0043.
- [8] A. Yamen and G. Can, “The impact of public governance perception on the quality of financial reporting,” *Econ. Res. Istraz.*, vol. 36, no. 3, p., 2023, doi: 10.1080/1331677X.2023.2223264.
- [9] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Mixed Methods Procedures*. 2018.
- [10] M. S, S. Sahade, and S. Rijal, “Analysis of The Effectiveness of Fiscal Policy in Driving the Regional Economy: Case Study in South Sulawesi Province, Indonesia,” *Int. J. Business, Law, Educ.*, vol. 4, no. 2, pp. 1295–1302, 2023, doi: 10.56442/ijble.v4i2.320.
- [11] H. Hanipah, P. Sugiartini, and I. M. Maula, “Analysis of the Impact of Government Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth in Indonesia: Government Economic Approach,” *J. Soc. Res.*, vol. 2, no. 11, pp. 3867–3871, 2023, doi: 10.55324/josr.v2i11.1498.
- [12] Z. T. Woldesemayat, “The Relative Effects of Fiscal and Monetary Policies on Ethiopian Economic Growth,” *Public Policy Adm. Res.*, vol. 10, no. 11, pp. 1–7, 2020, doi: 10.7176/ppar/10-11-01.
- [13] A. Barbier-Gauchard, K. Baret, and A. Minea, “National fiscal rules and fiscal discipline in the European Union,” *Appl. Econ.*, vol. 53, no. 20, pp. 2337–2359, 2021.
- [14] M. Buti, W. Roeger, and J. In’t Veld, “Stabilizing output and inflation: Policy conflicts and co-operation under a stability pact,” *J. Common Mark. Stud.*, vol. 39, no. 5, pp. 801–828, 2001, doi: 10.1111/1468-5965.00332.
- [15] K. Aswar, J. Jumansyah, S. Mulyani, and M. Sumardjo, “Moderating effect of internal control system to determinants influencing the financial statement disclosure,” *Invest. Manag. Financ. Innov.*, vol. 18, no. 3, pp. 104–112, 2021, doi: 10.21511/imfi.18(3).2021.10.
- [16] O. Z. Li, W. Wu, L. Xia, and Q. Zhang, “Fiscal-audit separation and government disclosure quality,” *J. Account. Public Policy*, vol. 42, no. 4, p. 107100, 2023, doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2023.107100.
- [17] R. Kanapickiene, G. Keliuotyte-Staniuleniene, and D. Teresiene, “Disclosure of non-current tangible assets information in private sector entities financial statements: The case of Lithuania,” *Economies*, vol. 9, no. 2, 2021, doi: 10.3390/economies9020078.
- [18] S. Pivac, T. Vuko, and M. Cular, “Analysis of annual report disclosure quality for listed companies in transition countries,” *Econ. Res. Istraz.*, vol. 30, no. 1, pp. 721–731, 2017, doi: 10.1080/1331677X.2017.1311231.